



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/ 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan rincian Dana Desa Setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DD

### Pasal 2

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian DD.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten.}$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

#### Pasal 7

Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENYALURAN DD

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2018;
  - b. Praturan Desa tentang APB Desa tahun 2018;
  - c. Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa;
  - d. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
  - e. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - f. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang didanai dari DD;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
  - h. kwitansi penerimaan tahap I.
- (2) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - b. kwitansi penerimaan tahap II.
- (3) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah Desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
  - b. kwitansi penerimaan tahap III.

#### Pasal 11

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (4) Apabila tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 12

Proses Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran DD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam rekomendasi Camat;
- d. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan dilampiri persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- e. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan proses penyaluran.

### BAB IV PENGUNAAN DD

#### Pasal 13

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Apabila terjadi hal yang mendesak atau bersifat khusus, DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan DD yang tidak termasuk prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh kepala Desa dengan cara mengajukan ijin persetujuan kepada Bupati melalui Camat pada saat pengajuan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Camat setelah menerima pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan.
- (3) Bupati menerima atau menolak pengajuan ijin paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengajuan.
- (4) Pemberian ijin atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai pedoman Camat untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DD

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 11-1-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop and a vertical stroke on the right side.

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOOROGO  
 NOMOR : 12 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
1	SLAHUNG	TUGUREJO	164.237.200,00	328.474.400,00	328.474.400,00	821.186.000,00
2	SLAHUNG	SENEPO	174.142.200,00	348.284.400,00	348.284.400,00	870.711.000,00
3	SLAHUNG	SLAHUNG	171.669.200,00	343.338.400,00	343.338.400,00	858.346.000,00
4	SLAHUNG	CALUK	140.060.600,00	280.121.200,00	280.121.200,00	700.303.000,00
5	SLAHUNG	BROTO	144.381.000,00	288.762.000,00	288.762.000,00	721.905.000,00
6	SLAHUNG	MENGGARE	134.034.000,00	268.068.000,00	268.068.000,00	670.170.000,00
7	SLAHUNG	KAMBENG	151.904.400,00	303.808.800,00	303.808.800,00	759.522.000,00
8	SLAHUNG	WATES	205.146.400,00	410.292.800,00	410.292.800,00	1.025.732.000,00
9	SLAHUNG	NGILO-ILO	200.315.600,00	400.631.200,00	400.631.200,00	1.001.578.000,00
10	SLAHUNG	DURI	157.384.600,00	314.769.200,00	314.769.200,00	786.923.000,00
11	SLAHUNG	NGLONING	139.680.000,00	279.360.000,00	279.360.000,00	698.400.000,00
12	SLAHUNG	PLANCUNGAN	143.653.800,00	287.307.600,00	287.307.600,00	718.269.000,00
13	SLAHUNG	JEBENG	136.075.000,00	272.150.000,00	272.150.000,00	680.375.000,00
14	SLAHUNG	GALAK	139.282.000,00	278.564.000,00	278.564.000,00	696.410.000,00
15	SLAHUNG	TRUNENG	140.348.000,00	280.696.000,00	280.696.000,00	701.740.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
16	SLAHUNG	SIMO	136.064.600,00	272.129.200,00	272.129.200,00	680.323.000,00
17	SLAHUNG	CRABAK	138.336.800,00	276.673.600,00	276.673.600,00	691.684.000,00
18	SLAHUNG	MOJOPITU	137.668.000,00	275.336.000,00	275.336.000,00	688.340.000,00
19	SLAHUNG	GUNDIK	136.934.600,00	273.869.200,00	273.869.200,00	684.673.000,00
20	SLAHUNG	NAILAN	132.382.200,00	264.764.400,00	264.764.400,00	661.911.000,00
21	SLAHUNG	GOMBANG	136.972.000,00	273.944.000,00	273.944.000,00	684.860.000,00
22	SLAHUNG	JANTI	147.704.400,00	295.408.800,00	295.408.800,00	738.522.000,00
23	NGRAYUN	WONODADI	218.255.200,00	436.510.400,00	436.510.400,00	1.091.276.000,00
24	NGRAYUN	SENDANG	223.915.400,00	447.830.800,00	447.830.800,00	1.119.577.000,00
25	NGRAYUN	BAOSAN KIDUL	281.461.600,00	562.923.200,00	562.923.200,00	1.407.308.000,00
26	NGRAYUN	BINADE	171.160.000,00	342.320.000,00	342.320.000,00	855.800.000,00
27	NGRAYUN	MRAYAN	257.220.800,00	514.441.600,00	514.441.600,00	1.286.104.000,00
28	NGRAYUN	BAOSAN LOR	245.912.400,00	491.824.800,00	491.824.800,00	1.229.562.000,00
29	NGRAYUN	TEMON	177.557.600,00	355.115.200,00	355.115.200,00	887.788.000,00
30	NGRAYUN	SELUR	249.131.000,00	498.262.000,00	498.262.000,00	1.245.655.000,00
31	NGRAYUN	NGRAYUN	206.751.400,00	413.502.800,00	413.502.800,00	1.033.757.000,00
32	NGRAYUN	CEPOKO	273.021.000,00	546.042.000,00	546.042.000,00	1.365.105.000,00
33	NGRAYUN	GEDANGAN	301.649.200,00	603.298.400,00	603.298.400,00	1.508.246.000,00
34	BUNGKAL	PELEM	149.560.800,00	299.121.600,00	299.121.600,00	747.804.000,00
35	BUNGKAL	KORIPAN	138.093.200,00	276.186.400,00	276.186.400,00	690.466.000,00
36	BUNGKAL	BEKARE	139.622.200,00	279.244.400,00	279.244.400,00	698.111.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
37	BUNGKAL	NAMBAK	140.776.000,00	281.552.000,00	281.552.000,00	703.880.000,00
38	BUNGKAL	KALISAT	139.140.600,00	278.281.200,00	278.281.200,00	695.703.000,00
39	BUNGKAL	MUNGGU	225.118.600,00	450.237.200,00	450.237.200,00	1.125.593.000,00
40	BUNGKAL	PAGER	141.476.400,00	282.952.800,00	282.952.800,00	707.382.000,00
41	BUNGKAL	BELANG	139.760.600,00	279.521.200,00	279.521.200,00	698.803.000,00
42	BUNGKAL	BUNGKAL	137.905.600,00	275.811.200,00	275.811.200,00	689.528.000,00
43	BUNGKAL	KETONGGO	136.590.000,00	273.180.000,00	273.180.000,00	682.950.000,00
44	BUNGKAL	KUNTI	135.955.200,00	271.910.400,00	271.910.400,00	679.776.000,00
45	BUNGKAL	BANCAR	140.431.200,00	280.862.400,00	280.862.400,00	702.156.000,00
46	BUNGKAL	PADAS	138.823.000,00	277.646.000,00	277.646.000,00	694.115.000,00
47	BUNGKAL	BUNGU	136.772.400,00	273.544.800,00	273.544.800,00	683.862.000,00
48	BUNGKAL	KUPUK	150.403.800,00	300.807.600,00	300.807.600,00	752.019.000,00
49	BUNGKAL	SAMBILAWANG	145.805.800,00	291.611.600,00	291.611.600,00	729.029.000,00
50	BUNGKAL	KWAJON	137.404.000,00	274.808.000,00	274.808.000,00	687.020.000,00
51	BUNGKAL	BEDIWETAN	140.752.400,00	281.504.800,00	281.504.800,00	703.762.000,00
52	BUNGKAL	BEDIKULON	135.608.400,00	271.216.800,00	271.216.800,00	678.042.000,00
53	SAMBIT	GAJAH	211.623.800,00	423.247.600,00	423.247.600,00	1.058.119.000,00
54	SAMBIT	WRINGINANOM	201.445.800,00	402.891.600,00	402.891.600,00	1.007.229.000,00
55	SAMBIT	NGADISANAN	184.581.800,00	369.163.600,00	369.163.600,00	922.909.000,00
56	SAMBIT	MAGUWAN	146.605.800,00	293.211.600,00	293.211.600,00	733.029.000,00
57	SAMBIT	NGLEWAN	183.339.600,00	366.679.200,00	366.679.200,00	916.698.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
58	SAMBIT	BEDINGIN	142.194.000,00	284.388.000,00	284.388.000,00	710.970.000,00
59	SAMBIT	BANCANGAN	135.699.600,00	271.399.200,00	271.399.200,00	678.498.000,00
60	SAMBIT	CAMPUREJO	137.113.600,00	274.227.200,00	274.227.200,00	685.568.000,00
61	SAMBIT	CAMPURSARI	132.548.000,00	265.096.000,00	265.096.000,00	662.740.000,00
62	SAMBIT	BULU	132.722.800,00	265.445.600,00	265.445.600,00	663.614.000,00
63	SAMBIT	SAMBIT	132.297.000,00	264.594.000,00	264.594.000,00	661.485.000,00
64	SAMBIT	BESUKI	137.221.400,00	274.442.800,00	274.442.800,00	686.107.000,00
65	SAMBIT	WILANGAN	136.979.200,00	273.958.400,00	273.958.400,00	684.896.000,00
66	SAMBIT	BANGSALAN	135.509.400,00	271.018.800,00	271.018.800,00	677.547.000,00
67	SAMBIT	KEMUNING	137.686.600,00	275.373.200,00	275.373.200,00	688.433.000,00
68	SAMBIT	JRAKAH	202.972.800,00	405.945.600,00	405.945.600,00	1.014.864.000,00
69	SAWOO	TUMPUK	216.544.400,00	433.088.800,00	433.088.800,00	1.082.722.000,00
70	SAWOO	PANGKAL	199.782.400,00	399.564.800,00	399.564.800,00	998.912.000,00
71	SAWOO	TUMPAK PELEM	170.099.600,00	340.199.200,00	340.199.200,00	850.498.000,00
72	SAWOO	TEMPURAN	236.906.200,00	473.812.400,00	473.812.400,00	1.184.531.000,00
73	SAWOO	SRITI	201.676.400,00	403.352.800,00	403.352.800,00	1.008.382.000,00
74	SAWOO	TEMON	226.152.800,00	452.305.600,00	452.305.600,00	1.130.764.000,00
75	SAWOO	SAWOO	166.846.000,00	333.692.000,00	333.692.000,00	834.230.000,00
76	SAWOO	PRAYUNGAN	142.740.600,00	285.481.200,00	285.481.200,00	713.703.000,00
77	SAWOO	TUGUREJO	141.336.800,00	282.673.600,00	282.673.600,00	706.684.000,00
78	SAWOO	GROGOL	168.911.400,00	337.822.800,00	337.822.800,00	844.557.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
79	SAWOO	KETRO	135.639.000,00	271.278.000,00	271.278.000,00	678.195.000,00
80	SAWOO	KORI	151.854.000,00	303.708.000,00	303.708.000,00	759.270.000,00
81	SAWOO	BONDRANG	142.853.400,00	285.706.800,00	285.706.800,00	714.267.000,00
82	SAWOO	NGINDENG	146.691.000,00	293.382.000,00	293.382.000,00	733.455.000,00
83	SOOKO	NGADIROJO	203.459.000,00	406.918.000,00	406.918.000,00	1.017.295.000,00
84	SOOKO	KLEPU	156.452.200,00	312.904.400,00	312.904.400,00	782.261.000,00
85	SOOKO	SURU	172.469.000,00	344.938.000,00	344.938.000,00	862.345.000,00
86	SOOKO	SOOKO	137.637.400,00	275.274.800,00	275.274.800,00	688.187.000,00
87	SOOKO	BEDOHO	151.619.800,00	303.239.600,00	303.239.600,00	758.099.000,00
88	SOOKO	JURUG	168.532.000,00	337.064.000,00	337.064.000,00	842.660.000,00
89	PULUNG	KARANGPATIHAN	140.698.200,00	281.396.400,00	281.396.400,00	703.491.000,00
90	PULUNG	TEGALREJO	140.720.400,00	281.440.800,00	281.440.800,00	703.602.000,00
91	PULUNG	BEDRUG	147.610.400,00	295.220.800,00	295.220.800,00	738.052.000,00
92	PULUNG	WAGIR KIDUL	194.860.600,00	389.721.200,00	389.721.200,00	974.303.000,00
93	PULUNG	SINGGAHAN	150.295.600,00	300.591.200,00	300.591.200,00	751.478.000,00
94	PULUNG	PATIK	139.215.400,00	278.430.800,00	278.430.800,00	696.077.000,00
95	PULUNG	PULUNG	138.289.400,00	276.578.800,00	276.578.800,00	691.447.000,00
96	PULUNG	PULUNG MERDIKO	136.908.800,00	273.817.600,00	273.817.600,00	684.544.000,00
97	PULUNG	SIDOHARJO	165.724.400,00	331.448.800,00	331.448.800,00	828.622.000,00
98	PULUNG	WOTAN	138.578.000,00	277.156.000,00	277.156.000,00	692.890.000,00
99	PULUNG	PLUNTURAN	147.975.200,00	295.950.400,00	295.950.400,00	739.876.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
100	PULUNG	POMAHAN	170.426.200,00	340.852.400,00	340.852.400,00	852.131.000,00
101	PULUNG	KESUGIHAN	140.083.400,00	280.166.800,00	280.166.800,00	700.417.000,00
102	PULUNG	SERAG	139.725.200,00	279.450.400,00	279.450.400,00	698.626.000,00
103	PULUNG	WAYANG	140.260.600,00	280.521.200,00	280.521.200,00	701.303.000,00
104	PULUNG	MUNGGUNG	160.725.200,00	321.450.400,00	321.450.400,00	803.626.000,00
105	PULUNG	BEKIRING	198.625.600,00	397.251.200,00	397.251.200,00	993.128.000,00
106	PULUNG	BANARAN	216.828.000,00	433.656.000,00	433.656.000,00	1.084.140.000,00
107	MLARAK	TUGU	184.134.400,00	368.268.800,00	368.268.800,00	920.672.000,00
108	MLARAK	CANDI	194.416.600,00	388.833.200,00	388.833.200,00	972.083.000,00
109	MLARAK	TOTOKAN	147.144.600,00	294.289.200,00	294.289.200,00	735.723.000,00
110	MLARAK	NGRUKEM	146.938.200,00	293.876.400,00	293.876.400,00	734.691.000,00
111	MLARAK	SIWALAN	142.758.400,00	285.516.800,00	285.516.800,00	713.792.000,00
112	MLARAK	JOESAN	134.633.600,00	269.267.200,00	269.267.200,00	673.168.000,00
113	MLARAK	NGLUMPANG	135.904.400,00	271.808.800,00	271.808.800,00	679.522.000,00
114	MLARAK	GONTOR	133.237.600,00	266.475.200,00	266.475.200,00	666.188.000,00
115	MLARAK	GANDU	136.293.400,00	272.586.800,00	272.586.800,00	681.467.000,00
116	MLARAK	JABUNG	136.100.400,00	272.200.800,00	272.200.800,00	680.502.000,00
117	MLARAK	BAJANG	133.748.800,00	267.497.600,00	267.497.600,00	668.744.000,00
118	MLARAK	MLARAK	144.841.800,00	289.683.600,00	289.683.600,00	724.209.000,00
119	MLARAK	SERANGAN	139.456.000,00	278.912.000,00	278.912.000,00	697.280.000,00
120	MLARAK	SUREN	186.089.400,00	372.178.800,00	372.178.800,00	930.447.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
121	MLARAK	KAPONAN	147.866.000,00	295.732.000,00	295.732.000,00	739.330.000,00
122	JETIS	NGASINAN	145.224.800,00	290.449.600,00	290.449.600,00	726.124.000,00
123	JETIS	KUTU KULON	132.188.200,00	264.376.400,00	264.376.400,00	660.941.000,00
124	JETIS	KUTU WETAN	137.189.000,00	274.378.000,00	274.378.000,00	685.945.000,00
125	JETIS	KRADENAN	140.157.800,00	280.315.600,00	280.315.600,00	700.789.000,00
126	JETIS	MOJOMATI	134.740.000,00	269.480.000,00	269.480.000,00	673.700.000,00
127	JETIS	COPER	135.145.200,00	270.290.400,00	270.290.400,00	675.726.000,00
128	JETIS	MOJOREJO	139.272.600,00	278.545.200,00	278.545.200,00	696.363.000,00
129	JETIS	KARANGGEBANG	145.056.000,00	290.112.000,00	290.112.000,00	725.280.000,00
130	JETIS	JETIS	131.853.400,00	263.706.800,00	263.706.800,00	659.267.000,00
131	JETIS	TEGALSARI	135.180.400,00	270.360.800,00	270.360.800,00	675.902.000,00
132	JETIS	WONOKETRO	134.272.600,00	268.545.200,00	268.545.200,00	671.363.000,00
133	JETIS	JOSARI	139.464.600,00	278.929.200,00	278.929.200,00	697.323.000,00
134	JETIS	TURI	134.842.000,00	269.684.000,00	269.684.000,00	674.210.000,00
135	JETIS	WINONG	136.599.400,00	273.198.800,00	273.198.800,00	682.997.000,00
136	SIMAN	DEMANGAN	136.513.200,00	273.026.400,00	273.026.400,00	682.566.000,00
137	SIMAN	NGABAR	135.336.000,00	270.672.000,00	270.672.000,00	676.680.000,00
138	SIMAN	MADUSARI	132.019.000,00	264.038.000,00	264.038.000,00	660.095.000,00
139	SIMAN	BETON	135.322.200,00	270.644.400,00	270.644.400,00	676.611.000,00
140	SIMAN	SEKARAN	136.634.200,00	273.268.400,00	273.268.400,00	683.171.000,00
141	SIMAN	BRAHU	135.719.000,00	271.438.000,00	271.438.000,00	678.595.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
142	SIMAN	KEPUHRUBUH	134.394.400,00	268.788.800,00	268.788.800,00	671.972.000,00
143	SIMAN	SAWUH	131.874.800,00	263.749.600,00	263.749.600,00	659.374.000,00
144	SIMAN	JARAK	137.680.600,00	275.361.200,00	275.361.200,00	688.403.000,00
145	SIMAN	TRANJANG	137.374.400,00	274.748.800,00	274.748.800,00	686.872.000,00
146	SIMAN	PIJERAN	139.832.400,00	279.664.800,00	279.664.800,00	699.162.000,00
147	SIMAN	MANUK	135.412.600,00	270.825.200,00	270.825.200,00	677.063.000,00
148	SIMAN	SIMAN	134.277.600,00	268.555.200,00	268.555.200,00	671.388.000,00
149	SIMAN	PATIHAN KIDUL	134.567.400,00	269.134.800,00	269.134.800,00	672.837.000,00
150	SIMAN	RONOSENTANAN	140.035.800,00	280.071.600,00	280.071.600,00	700.179.000,00
151	SIMAN	TAJUG	135.361.000,00	270.722.000,00	270.722.000,00	676.805.000,00
152	BALONG	PANDAK	170.716.000,00	341.432.000,00	341.432.000,00	853.580.000,00
153	BALONG	BULU KIDUL	137.637.600,00	275.275.200,00	275.275.200,00	688.188.000,00
154	BALONG	BULAK	145.295.200,00	290.590.400,00	290.590.400,00	726.476.000,00
155	BALONG	NGENDUT	145.987.200,00	291.974.400,00	291.974.400,00	729.936.000,00
156	BALONG	KARANGPATIHAN	161.408.600,00	322.817.200,00	322.817.200,00	807.043.000,00
157	BALONG	SUMBEREJO	140.252.200,00	280.504.400,00	280.504.400,00	701.261.000,00
158	BALONG	NGUMPUL	138.509.600,00	277.019.200,00	277.019.200,00	692.548.000,00
159	BALONG	NGRAKET	134.509.000,00	269.018.000,00	269.018.000,00	672.545.000,00
160	BALONG	DADAPAN	138.696.600,00	277.393.200,00	277.393.200,00	693.483.000,00
161	BALONG	SINGKIL	138.753.200,00	277.506.400,00	277.506.400,00	693.766.000,00
162	BALONG	KARANGAN	139.232.800,00	278.465.600,00	278.465.600,00	696.164.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
163	BALONG	BAJANG	142.298.400,00	284.596.800,00	284.596.800,00	711.492.000,00
164	BALONG	BALONG	136.744.600,00	273.489.200,00	273.489.200,00	683.723.000,00
165	BALONG	JALEN	136.980.800,00	273.961.600,00	273.961.600,00	684.904.000,00
166	BALONG	KARANGMOJO	133.695.200,00	267.390.400,00	267.390.400,00	668.476.000,00
167	BALONG	SEDARAT	147.453.200,00	294.906.400,00	294.906.400,00	737.266.000,00
168	BALONG	PURWOREJO	145.224.000,00	290.448.000,00	290.448.000,00	726.120.000,00
169	BALONG	TATUNG	180.020.400,00	360.040.800,00	360.040.800,00	900.102.000,00
170	BALONG	MUNENG	181.632.400,00	363.264.800,00	363.264.800,00	908.162.000,00
171	BALONG	NGAMPEL	138.613.400,00	277.226.800,00	277.226.800,00	693.067.000,00
172	KAUMAN	TEGALOMBO	148.090.200,00	296.180.400,00	296.180.400,00	740.451.000,00
173	KAUMAN	NONGKODONO	135.642.000,00	271.284.000,00	271.284.000,00	678.210.000,00
174	KAUMAN	SUKOSARI	137.309.600,00	274.619.200,00	274.619.200,00	686.548.000,00
175	KAUMAN	NGRANDU	151.846.800,00	303.693.600,00	303.693.600,00	759.234.000,00
176	KAUMAN	NGLARANGAN	132.422.400,00	264.844.800,00	264.844.800,00	662.112.000,00
177	KAUMAN	BRINGIN	143.764.200,00	287.528.400,00	287.528.400,00	718.821.000,00
178	KAUMAN	PENGKOL	144.777.000,00	289.554.000,00	289.554.000,00	723.885.000,00
179	KAUMAN	GABEL	148.636.200,00	297.272.400,00	297.272.400,00	743.181.000,00
180	KAUMAN	CILUK	137.445.600,00	274.891.200,00	274.891.200,00	687.228.000,00
181	KAUMAN	SEMANDING	142.893.000,00	285.786.000,00	285.786.000,00	714.465.000,00
182	KAUMAN	TOSANAN	141.157.200,00	282.314.400,00	282.314.400,00	705.786.000,00
183	KAUMAN	MARON	146.977.000,00	293.954.000,00	293.954.000,00	734.885.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
184	KAUMAN	SOMOROTO	155.075.400,00	310.150.800,00	310.150.800,00	775.377.000,00
185	KAUMAN	PLOSOJENAR	143.654.600,00	287.309.200,00	287.309.200,00	718.273.000,00
186	KAUMAN	CARAT	142.152.200,00	284.304.400,00	284.304.400,00	710.761.000,00
187	KAUMAN	KAUMAN	152.737.000,00	305.474.000,00	305.474.000,00	763.685.000,00
188	BADEGAN	DAYAKAN	250.739.600,00	501.479.200,00	501.479.200,00	1.253.698.000,00
189	BADEGAN	KARANGAN	156.217.200,00	312.434.400,00	312.434.400,00	781.086.000,00
190	BADEGAN	TANJUNGGUNUNG	150.335.400,00	300.670.800,00	300.670.800,00	751.677.000,00
191	BADEGAN	KARANGJOHO	144.388.600,00	288.777.200,00	288.777.200,00	721.943.000,00
192	BADEGAN	TANJUNGREJO	208.471.800,00	416.943.600,00	416.943.600,00	1.042.359.000,00
193	BADEGAN	BANDARALIM	138.521.600,00	277.043.200,00	277.043.200,00	692.608.000,00
194	BADEGAN	KAPURAN	142.228.200,00	284.456.400,00	284.456.400,00	711.141.000,00
195	BADEGAN	WATUBONANG	172.296.200,00	344.592.400,00	344.592.400,00	861.481.000,00
196	BADEGAN	BITING	149.565.800,00	299.131.600,00	299.131.600,00	747.829.000,00
197	BADEGAN	BADEGAN	144.487.600,00	288.975.200,00	288.975.200,00	722.438.000,00
198	SAMPUNG	SAMPUNG	142.931.600,00	285.863.200,00	285.863.200,00	714.658.000,00
199	SAMPUNG	POHIJO	184.398.800,00	368.797.600,00	368.797.600,00	921.994.000,00
200	SAMPUNG	JENANGAN	139.276.200,00	278.552.400,00	278.552.400,00	696.381.000,00
201	SAMPUNG	NGLURUP	137.723.800,00	275.447.600,00	275.447.600,00	688.619.000,00
202	SAMPUNG	TULUNG	150.153.200,00	300.306.400,00	300.306.400,00	750.766.000,00
203	SAMPUNG	CARANGREJO	150.245.200,00	300.490.400,00	300.490.400,00	751.226.000,00
204	SAMPUNG	PAGERUKIR	189.671.000,00	379.342.000,00	379.342.000,00	948.355.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
205	SAMPUNG	KUNTI	143.826.800,00	287.653.600,00	287.653.600,00	719.134.000,00
206	SAMPUNG	GLINGGANG	135.886.800,00	271.773.600,00	271.773.600,00	679.434.000,00
207	SAMPUNG	GELANGKULON	147.051.000,00	294.102.000,00	294.102.000,00	735.255.000,00
208	SAMPUNG	KARANGWALUH	139.274.200,00	278.548.400,00	278.548.400,00	696.371.000,00
209	SAMPUNG	RINGINPUTIH	142.122.600,00	284.245.200,00	284.245.200,00	710.613.000,00
210	SUKOREJO	SUKOREJO	150.409.400,00	300.818.800,00	300.818.800,00	752.047.000,00
211	SUKOREJO	BANGUNREJO	184.307.800,00	368.615.600,00	368.615.600,00	921.539.000,00
212	SUKOREJO	SIDOREJO	186.417.200,00	372.834.400,00	372.834.400,00	932.086.000,00
213	SUKOREJO	NAMBANGREJO	144.651.600,00	289.303.200,00	289.303.200,00	723.258.000,00
214	SUKOREJO	LENGKONG	142.662.800,00	285.325.600,00	285.325.600,00	713.314.000,00
215	SUKOREJO	GELANG LOR	146.401.800,00	292.803.600,00	292.803.600,00	732.009.000,00
216	SUKOREJO	SERANGAN	138.947.000,00	277.894.000,00	277.894.000,00	694.735.000,00
217	SUKOREJO	NAMPAN	136.176.200,00	272.352.400,00	272.352.400,00	680.881.000,00
218	SUKOREJO	KRANGGAN	136.092.200,00	272.184.400,00	272.184.400,00	680.461.000,00
219	SUKOREJO	GOLAN	138.136.600,00	276.273.200,00	276.273.200,00	690.683.000,00
220	SUKOREJO	PRAJEGAN	198.369.200,00	396.738.400,00	396.738.400,00	991.846.000,00
221	SUKOREJO	KEDUNGBANTENG	143.681.600,00	287.363.200,00	287.363.200,00	718.408.000,00
222	SUKOREJO	KARANGLO LOR	134.249.200,00	268.498.400,00	268.498.400,00	671.246.000,00
223	SUKOREJO	GEGERAN	141.067.400,00	282.134.800,00	282.134.800,00	705.337.000,00
224	SUKOREJO	GANDUKEPUH	145.123.400,00	290.246.800,00	290.246.800,00	725.617.000,00
225	SUKOREJO	KALIMALANG	135.943.000,00	271.886.000,00	271.886.000,00	679.715.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
226	SUKOREJO	SRAGI	137.668.400,00	275.336.800,00	275.336.800,00	688.342.000,00
227	SUKOREJO	MOROSARI	137.605.200,00	275.210.400,00	275.210.400,00	688.026.000,00
228	BABADAN	CEKOK	136.530.200,00	273.060.400,00	273.060.400,00	682.651.000,00
229	BABADAN	JAPAN	139.056.400,00	278.112.800,00	278.112.800,00	695.282.000,00
230	BABADAN	GUPOLO	135.425.200,00	270.850.400,00	270.850.400,00	677.126.000,00
231	BABADAN	POLOREJO	141.347.400,00	282.694.800,00	282.694.800,00	706.737.000,00
232	BABADAN	BARENG	136.251.200,00	272.502.400,00	272.502.400,00	681.256.000,00
233	BABADAN	NGUNUT	140.312.000,00	280.624.000,00	280.624.000,00	701.560.000,00
234	BABADAN	SUKOSARI	143.727.600,00	287.455.200,00	287.455.200,00	718.638.000,00
235	BABADAN	LEMBAH	141.471.000,00	282.942.000,00	282.942.000,00	707.355.000,00
236	BABADAN	PONDOK	135.260.400,00	270.520.800,00	270.520.800,00	676.302.000,00
237	BABADAN	BABADAN	137.785.400,00	275.570.800,00	275.570.800,00	688.927.000,00
238	BABADAN	PURWOSARI	140.512.400,00	281.024.800,00	281.024.800,00	702.562.000,00
239	BABADAN	TRISONO	144.737.400,00	289.474.800,00	289.474.800,00	723.687.000,00
240	JENANGAN	MRICAN	147.141.400,00	294.282.800,00	294.282.800,00	735.707.000,00
241	JENANGAN	PLALANGAN	146.526.600,00	293.053.200,00	293.053.200,00	732.633.000,00
242	JENANGAN	NGLAYANG	138.740.800,00	277.481.600,00	277.481.600,00	693.704.000,00
243	JENANGAN	JENANGAN	141.691.400,00	283.382.800,00	283.382.800,00	708.457.000,00
244	JENANGAN	JIMBE	137.637.600,00	275.275.200,00	275.275.200,00	688.188.000,00
245	JENANGAN	NGRUPIT	144.238.200,00	288.476.400,00	288.476.400,00	721.191.000,00
246	JENANGAN	PINTU	133.530.000,00	267.060.000,00	267.060.000,00	667.650.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
247	JENANGAN	SEDAH	133.574.800,00	267.149.600,00	267.149.600,00	667.874.000,00
248	JENANGAN	PANJENG	135.966.200,00	271.932.400,00	271.932.400,00	679.831.000,00
249	JENANGAN	SRATEN	133.534.400,00	267.068.800,00	267.068.800,00	667.672.000,00
250	JENANGAN	SEMANDING	137.298.800,00	274.597.600,00	274.597.600,00	686.494.000,00
251	JENANGAN	TANJUNGSARI	138.695.600,00	277.391.200,00	277.391.200,00	693.478.000,00
252	JENANGAN	PARINGAN	157.118.400,00	314.236.800,00	314.236.800,00	785.592.000,00
253	JENANGAN	WATES	150.989.200,00	301.978.400,00	301.978.400,00	754.946.000,00
254	JENANGAN	KEMIRI	151.684.800,00	303.369.600,00	303.369.600,00	758.424.000,00
255	NGEBEL	NGROGUNG	151.552.400,00	303.104.800,00	303.104.800,00	757.762.000,00
256	NGEBEL	SAHANG	144.446.400,00	288.892.800,00	288.892.800,00	722.232.000,00
257	NGEBEL	WAGIR LOR	149.869.400,00	299.738.800,00	299.738.800,00	749.347.000,00
258	NGEBEL	TALUN	201.287.000,00	402.574.000,00	402.574.000,00	1.006.435.000,00
259	NGEBEL	GONDOWIDO	158.089.000,00	316.178.000,00	316.178.000,00	790.445.000,00
260	NGEBEL	PUPUS	161.709.000,00	323.418.000,00	323.418.000,00	808.545.000,00
261	NGEBEL	NGEBEL	150.946.800,00	301.893.600,00	301.893.600,00	754.734.000,00
262	NGEBEL	SEMPU	146.797.000,00	293.594.000,00	293.594.000,00	733.985.000,00
263	JAMBON	JONGGOL	189.486.000,00	378.972.000,00	378.972.000,00	947.430.000,00
264	JAMBON	POKO	145.670.600,00	291.341.200,00	291.341.200,00	728.353.000,00
265	JAMBON	SENDANG	192.624.400,00	385.248.800,00	385.248.800,00	963.122.000,00
266	JAMBON	BRINGINAN	141.901.600,00	283.803.200,00	283.803.200,00	709.508.000,00
267	JAMBON	KARANGLO KIDUL	193.758.000,00	387.516.000,00	387.516.000,00	968.790.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			
			TAHAP I (20%) Rp.	TAHAP II (40%) Rp.	TAHAP III (40%) Rp.	JUMLAH Rp.
268	JAMBON	KREBET	198.759.200,00	397.518.400,00	397.518.400,00	993.796.000,00
269	JAMBON	BULU LOR	204.340.000,00	408.680.000,00	408.680.000,00	1.021.700.000,00
270	JAMBON	JAMBON	140.929.600,00	281.859.200,00	281.859.200,00	704.648.000,00
271	JAMBON	BLEMBEM	168.590.800,00	337.181.600,00	337.181.600,00	842.954.000,00
272	JAMBON	PULOSARI	144.619.800,00	289.239.600,00	289.239.600,00	723.099.000,00
273	JAMBON	MENANG	131.492.400,00	262.984.800,00	262.984.800,00	657.462.000,00
274	JAMBON	SRANDIL	132.290.200,00	264.580.400,00	264.580.400,00	661.451.000,00
275	JAMBON	SIDOHARJO	239.627.800,00	479.255.600,00	479.255.600,00	1.198.139.000,00
276	PUDAK	BARENG	188.823.800,00	377.647.600,00	377.647.600,00	944.119.000,00
277	PUDAK	TAMBANG	145.027.400,00	290.054.800,00	290.054.800,00	725.137.000,00
278	PUDAK	KRISIK	142.068.600,00	284.137.200,00	284.137.200,00	710.343.000,00
279	PUDAK	PUDAK WETAN	146.175.400,00	292.350.800,00	292.350.800,00	730.877.000,00
280	PUDAK	BANJAREJO	151.671.600,00	303.343.200,00	303.343.200,00	758.358.000,00
281	PUDAK	PUDAK KULON	145.552.200,00	291.104.400,00	291.104.400,00	727.761.000,00
J U M L A H			43.322.667.000,00	86.645.334.000,00	86.645.334.000,00	216.613.335.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016



NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA ORANG	DURASI HARI	UPAH Rp.	KET.
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	- Kegiatan											
2.4.2	- dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	- Kegiatan											
2.5.2	- dst											
	JUMLAH BELANJA											

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016